

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Anggaran Pemprov DKI Dinilai Relevan Gratiskan Biaya Sekolah

JAKARTA (Poskota) - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai sekolah gratis khususnya bagi warga Jakarta perlu diwujudkan. Menurut dia, pendidikan gratis selama 12 tahun sesuai amanat Undang-Undang perlu diperhatikan.

"Pendidikan bebas biaya ini harus segera diwujudkan. Pembahasan panjang lebar sudah cukup lah," kata Ubaid melalui pesan singkat, Rabu (17/7).

Ubaid berujar, sekolah gratis bisa diwujudkan dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan sekolah gratis.

"Daripada KJP banyak yang salah sasaran dan banyak juga anak KJP yang gagal PPDB, kan bahaya. Mereka banyak yang putus sekolah," katanya.

Menurut dia, anggaran tersebut sangat relevan untuk merealisasikan sekolah gratis bagi warga Jakarta. "Anggaran untuk KJP kan banyak itu, kan pemborosan kalau tidak tepat sasaran. Tiap tahun, anggaran KJP naik turun di kisaran 3-6 triliun, itu kalau dialihkan ke sekolah bebas biaya, sudah lebih dari cukup," tuturnya.

Lebih lanjut, Ubaid menuturkan jika seharusnya tidak ada lagi proses PPDB bagi anak yang ingin bersekolah. Pasalnya, hal itu justru malah bertentangan dengan amanat Undang-Undang yang menjamin pendidikan gratis bagi masyarakat.

"Penerapan sekolah bebas biaya ini, dasar hukumnya sudah jelas, jadi Jakarta harus jadi contoh dan inspirasi daerah-daerah lain," ucapnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta kepada pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat realisasi sekolah swasta gratis.

Sekrestaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhony Simanjuntak mengatakan jika DPRD telah mengusulkan sekolah swasta gratis sejak setahun lalu.

"Sebenarnya kami sudah bicarakan itu sejak setahun yang lalu dan kita mengharapkan Dinas Pendidikan membuat kajian akademiknya lah ya, secepatnya, supaya nanti secepatnya di APBD 2025 ini udah bisa kita luncurkan," kata Jhony melalui sambungan telepon, Selasa 16 Juli 2024.

Menurut Jhony, seluruh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta telah sepakat jika Pemprov DKI Jakarta menyediakan sekolah swasta gratis bagi masyarakat. Hal ini lantaran bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) dinilai bukan menjadi solusi bagi warga Jakarta untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun.

(Pandi/den)